



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi dalam Tyas (2020) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Rudianto (2013:189) yaitu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Menurut Munawir (2012:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan Perusahaan.

Mardiasmo (2019) Mengatakan Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Dengan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Penilaian kinerja setiap



perusahaan adalah berbeda-beda karena ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada bidang pertambangan maka ruang lingkungannya berbeda dengan perusahaan di bidang pertanian. Begitu juga dengan perusahaan transportasi yang jelas memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya. Menurut Irham Fahmi (2012:3), ada lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara umum yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidahkaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lain.

### 2.1.2. Analisis Kinerja keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan



anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010). Menurut Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi- potensi kinerja yang akan berlanjut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan. Bastian (2017) juga menyebutkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki fungsi dan peranan dalam memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Universitas Islam Indragiri**

consensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dalam menilai kinerja. Fungsi lainnya adalah membangun dasar dari pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim 2007:230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan



pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### 2.1.3. Analisis Rasio Keuangan

#### A. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232). Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besar kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah (Hehamahua, 2014). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman(Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang



merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan**

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Sangat Rendah      | 0% - 25%        | Instruktif    |
| Rendah             | 25% - 50%       | Konsultif     |
| Sedang             | 50% - 75%       | Partisipatif  |
| Tinggi             | 75% - 100%      | Delegatif     |

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

## B. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah/desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah/desa yang telah dianggarkan (Susanto, 2019). Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2020). Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Sartika (2019).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD Desa}}{\text{Anggaran PAD Desa}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

| Kriteria Efektivitas | Efektivitas (%) |
|----------------------|-----------------|
| Sangat Efektif       | >100%           |
| Efektif              | 90% - 100%      |
| Cukup Efektif        | 80% - 90%       |
| Kurang Efektif       | 60% - 80%       |
| Tidak Efektif        | ≤ 60%           |

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

### C. Rasio efesiensi

Rasio efesiensi PAD menggambarkan perbandingan dari realisasi biaya yang dikeluarkan dalam proses pencapaian realisasi PAD dengan jumlah realisasi PAD itu sendiri. Rasio ini digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam memanfaatkan anggaran yang ada dalam pemenuhan pendapatan secara efisien. Penilaian terhadap tingkat efesiensi PAD dapat memperkuat penilaian kinerja keuangan daerah terutama berkaitan dengan efektifitas PAD.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Suatu pemerintah daerah bisa dikatakan efektif dan efisien apabila dapat memenuhi realisasi sesuai dengan target dan diimbangi dengan pengeluaran biaya pemerolehan realisasi tidak terlalu besar dan sesuai dengan porsi realisasi tersebut. Berikut formula rasio efisiensi PAD:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

#### D. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:116) rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Menurut Arief Sugiono (2019:68) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri. Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan memberikan alat yang berguna bagi pemerintah desa untuk mengelola dan merencanakan pembangunan secara lebih efektif, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### E. Rasio Keserasian

Pemerintah daerah memiliki prioritas dalam penggunaan belanjanya. Alokasi dana dapat diprioritaskan pada belanja operasiional ataupun belanja modal dalam pembangunan, pelayanan, dan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### a) Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi terhadap total belanja daerah. Hasil dari perhitungan ini dapat memberikan informasi seberapa besar porsi yang dialokasikan pemerintah untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan keseharian pemerintah daerah yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran atau bermanfaat untuk jangka pendek. Belanja operasi bisa dikatakan sebagai belanja rutin karena sifatnya berulang untuk setiap tahun anggaran. Umumnya, pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan dananya untuk belanja operasi ini. Perhitungan rasio keserasian terkait rasio belanja operasi dalam mengukur besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dapat diukur dengan menggunakan formula berikut ini :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### b) Rasio Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah dalam



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

meningkatkan kesejahteraan daerah. Belanja modal memberikan manfaat untuk jangka menengah hingga jangka panjang yang tiap tahunnya dianggarkan. Umumnya, proporsi belanja modal dalam belanja daerah yaitu sebesar 5-20%. Perhitungan keserasian belanja modal dapat dihitung dengan membandingkan total belanja modal terhadap belanja daerah, dengan rumus yang dapat dilihat berikut ini :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

| Peneliti                    | Judul Penelitian                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ghea Triane Lengkong (2023) | Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten banggai provinsi sulawesi tengah   | Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yakni daerah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan kinerja keuangan daerah terdapat indikator yang masih kurang yakni pada rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian daerah, sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Banggai sudah menunjukkan hasil yang memuaskan |
| Nenda Marliani (2022)       | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020                   | Pada indikator kemandirian daerah serta derajat desentralisasi pada Kabupaten Bandung masih kurang sedangkan efektivitas dan efisiensi keuangan di daerah tersebut sudah baik.                                                                                                                                                                                                   |
| Aril Gunawan, (2023)        | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ( Studi Kasus Pada | Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan dapat dikategorikan sangat baik (2) Rasio Drajat Desentralisasi Fisikal pola                                                                                                                                                                       |

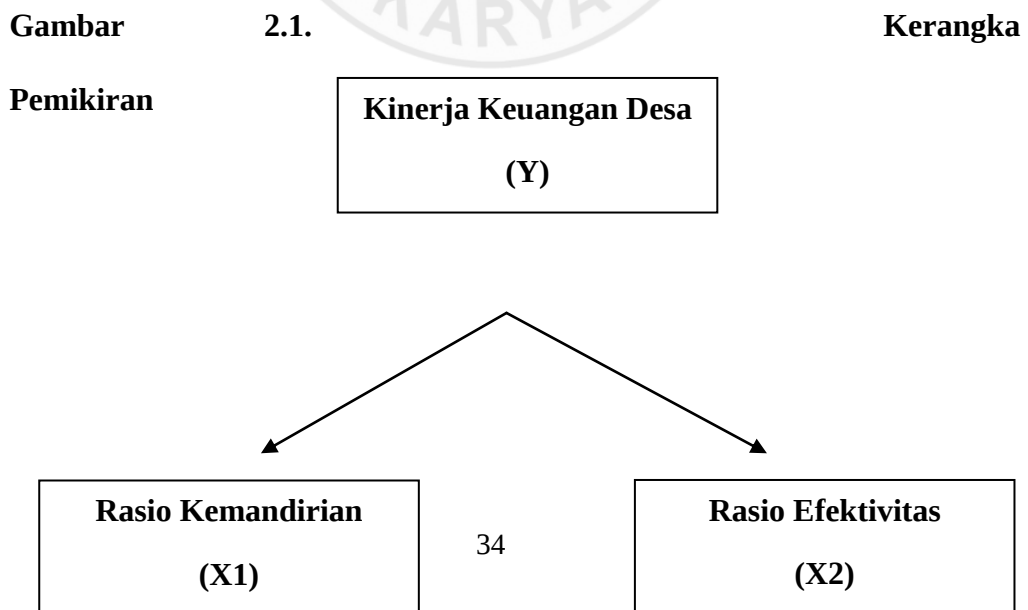


|                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2022                                                                     | hubungannya dikategorikan sangat baik, (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat efektif (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien                                                           |
| Sari Eka Putri dan Agus Munandar (2021) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020                                             | Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif sehingga dapat diperoleh hasil yakni indikator kemandirian daerah di Kota Malang masih sangat kurang oleh sebab itu Kota Malang dalam kinerja keuangannya masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat |
| Muhammad Zulkarnain dan Yuliana (2021)  | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur | Hasil pada efisiensi pembelanjaan daerah sudah baik namun tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur masih kurang baik.                                                                                                                  |

Sumber : beberapa Penelitian

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan didukung oleh landasan teoritis yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat penulis kemukakan dan mengambil hipotesis sementara sebagai berikut:

- a. Diduga Kinerja Keuangan Desa Saka Palas Jaya diukur dengan Rasio Kemandirian memperoleh pola hubungan yang delegatif.
- b. Diduga Kinerja Keuangan Desa Saka palas jaya diukur dengan Rasio Efektivitas memperoleh Kriteria yang efektif.